

# **PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP KESEHATERAAN PEDAGANG PEREMPUAN DI PASAR SAGUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Rina Tiur Lona<sup>1</sup>, Nurbaya Harianja<sup>2</sup>, Tri Eva Juniasih<sup>3</sup>  
*rinatlpakpahan@yahoo.com*

**Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan**

## **ABSTRAK**

Kondisi perempuan masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi perempuan pada masa lalu, sekarang perempuan telah merasakan kebebasan atas hak-hak yang diperjuangkan pada masa lalu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran badan pemberdayaan perempuan Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para pedagang yang ada di Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan para pedagang perempuan di pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan adalah memprioritaskan anggaran dan sumber daya, guna mencapai tujuan dan sasaran program pemberdayaan pedagang miskin, menetapkan prioritas dan target pencapaian program pemberdayaan kaum pedagang perempuan. mengevaluasi target pencapaian dan pelaksanaan program pemberdayaan, memfasilitasi kondisi pasar yang mendukung melalui penetapan peraturan daerah tentang pemberdayaan pedagang, memotivasi dan menguatkan organisasi partisipasi pedagang dalam pemberdayaan kaum pedagang perempuan untuk mencapai kemandirian, memberikan bantuan modal melalui simpan pinjam yang disediakan, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pedagang. Dan melakukan kontrol dan evaluasi terhadap semua program pemberdayaan pedagang perempuan agar tetap berjalan dalam kebijakan-kebijakan yang telah disepakati.

**Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, Kesejahteraan**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan hal terpenting yang harus ditingkatkan demi mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pola pembangunan nasional mesti mengacu pada konsep pembangunan yang utuh, menyeluruh dan melibatkan peran aktif seluruh masyarakat. Tanpa peran aktif masyarakat, maka pembangunan nasional akan mengalami hambatan dan bahkan kegagalan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan akhir-akhir ini memang menunjukkan frekuensi yang meningkat, namun keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya belum maksimal.

Hal ini dapat dilihat pada kondisi memprihatinkan yang melilit perempuan, yang mana perempuan masih dianggap memiliki status dan kedudukan yang hanya berperan dalam rumah tangga dan berkulat pekerjaan rumah tangga yaitu memasak, membersihkan rumah, dan menjaga anak.

Tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses terhadap informasi menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap berbagai krisis yang terjadi, baik ekonomi maupun sosial. Perempuan masih terbelenggu dalam kondisi diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, angka buta huruf dikalangan perempuan cukup tinggi, pengangguran dan upah yang

diterima pekerja perempuan cukup rendah bila dibandingkan dengan laki-laki.

Pada zaman teknologi informasi sekarang ini, sosok wanita karir yang sukses merupakan fenomena umum mulai dari kota-kota besar, walaupun sebagai seorang ibu rumah tangga. Memang tidak sedikit yang menjalani fungsi ganda, sebagai wanita karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Bagi yang pintar mensiasati waktu, sukses dalam dua bidang tersebut bukanlah hal yang mustahil, tetapi kesuksesan keduanya bukanlah sesuatu yang mudah. Seringkali wanita tersebut mengalami kewalahan dalam membagi waktu, tak jarang harus mengalami salah satu kegagalan. Saat pada kondisi ini wanita terpaksa harus memilih rumah tangga atau karir. Di samping itu, banyak perempuan yang memilih apakah hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, atau bekerja sebagai pedangang, maupun bekerja serabutan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan.

Kondisi perempuan masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi perempuan pada masa lalu, sekarang perempuan telah merasakan kebebasan atas hak-hak yang diperjuangkan pada masa lalu. Namun emansipasi wanita dijadikan kedok kebebasan yang sebeb-as-bebasnya oleh kaum wanita yang sangat miris dilakukan pada zaman millennial ini. Contohnya sebagian kaum wanita dengan kebebasannya untuk memperdagangkan diri dalam balutan gaun seksi, ada juga wanita dengan kecantikannya terhubung dalam jaringan gelap prostitusi, ada pula wanita yang ingin menyamai laki-laki, dan ada banyak wanita yang dengan bangga menjadi pelacur serta hal tersebut bukan menjadi hal yang tabu oleh wanita. Dengan demikian bahwa kebebasan tersebut malah menghancurkan derajat para wanita dan emansipasi sendiri kehilangan maknanya.

Dengan gaya hidup perempuan di era globalisasi seperti ini, sebagian besar wanita tidak memahami peran dan posisinya dalam masyarakat, ada juga yang lupa akan sejarah perjuangan wanita, ada pula wanita yang hidup dengan kebebasan yang seluas-luasnya. Tak jarang mereka para wanita juga melupakan aturan-aturan dalam masyarakat meskipun tidak tertulis. Dalam menciptakan perempuan yang memiliki intelektual yang tinggi dibutuhkan peran dari berbagai pihak salah satunya adalah peran Badan Pemberdayaan Perempuan. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, Torang, 2014:86). Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Ginandjar Kartasasmitha, 1996:145).

Di era globalisasi ini peran wanita tidak hanya dalam keluarga untuk melayani suami dan anak, namun bebas untuk berkiprah dalam kancah publik maupun domestik dengan tetap memperhatikan tugasnya dalam keluarga. Dengan kata lain bahwa wanita masa kini dapat berkontribusi dalam segala bidang kehidupan masyarakat tanpa ada diskriminasi pembagian kerja. Dalam pasal 65 ayat 1 Undang- Undang nomor 12 tahun 2003 mengenai keterwakilan sekurang- kurangnya 30% wanita dalam politik merupakan bentuk nyata untuk perempuan berperan dalam ranah politik.

Globalisasi yang semakin meracuni generasi bangsa, dan tidak sedikit wanita yang terlena dengan kemewahan dan kecanggihan.

Kemudian akan mempengaruhi keterwakilan wanita dalam pembangunan bangsa, sehingga tidak ada lagi pembuktian bahwa wanita mampu berdiri membangun bangsa. apabila dibiarkan terus- menerus maka generasi muda wanita bangsa Indonesia akan menjadi generasi yang bimbang, tanpa masa depan yang pasti, tanpa pengetahuan yang luas, apalagi jika di tambah dengan semakin merosotnya moral wanita masa kini (Opini Untan, 2018).

Bila kondisi perempuan ini dibiarkan, maka perempuan yang diharapkan sebagai elemen penting untuk berperan aktif dalam pembangunan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya terpadu dalam rangka memberdayakan perempuan dan upaya peningkatan kualitas perempuan, baik dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, hukum, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, isteri mempunyai tugas tertentu, mulai dari hal yang bersifat domestik sampai hal-hal di luar rumah tangga (publik). Berdasarkan kenyataan ini, maka dalam kehidupan sehari-hari ternyata curahan jam kerja isteri lebih besar daripada curahan jam kerja suami.

Pada kenyataannya di era digital ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kehidupan keluarga di masyarakat sekarang ini, masih banyak keluarga yang belum terpenuhi kesejahteraannya. Misalnya kesejahteraan ekonomi yang belum terpenuhi karena pendapatan suami rendah, tidak mencukupi kebutuhan pokok. Anak yang tidak bersekolah karena orang tua tidak mempunyai biaya. Permasalahan seperti itu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Dalam hal ini, anggota keluarga dituntut untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Kesejahteraan memiliki arti yaitu

usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu kesejahteraan sosial dianalogikan sebagai kesehatan jiwa yang dapat dilihat dari empat sudut pandang yaitu keadaan, ilmu, kegiatan, dan gerakan (Rizal: 2013).

Seperti halnya yang terjadi pada perempuan pedagang di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan. Para pedagang sebagian besar merupakan para Ibu yang berjuang mulai dari pagi hingga menjelang malam hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dari data yang diperoleh, hampir 80% pedagang yang terdapat di Pasar Sagumpal Bonang merupakan kaum Ibu. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan peran perempuan sangat besar, karena di satu sisi mereka menyediakan makanan bergizi bagi anggota keluarganya, tetapi pada sisi lain mereka turut mencari nafkah guna mewujudkan keinginan tersebut.

Melihat potensi perempuan yang cukup besar dan kerentanan terhadap kegagalan pembangunan, maka perempuan harus diberdayakan agar dapat menolong dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai manusia biasa dan penopang hidup keluarga sudah selayaknya perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Dukungan dapat saja diberikan antara lain dengan menciptakan kesempatan kerja, waktu, modal, pendidikan dan keterampilan, sehingga memperoleh penghasilan tanpa harus melepaskan tugasnya sebagai ibu yang mengasuh, mendidik dan membina anak-anaknya sebagai penerus bangsa. Berbagai program telah dilancarkan oleh pemerintah, namun dalam kenyataannya ketimpangan dan kesenjangan tetap saja melebar antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bentuk

partisipasi. Padahal, apabila terjadi kegagalan pembangunan, maka akses yang paling rentan dan pertama dirasakan adalah oleh kaum perempuan. Jika perempuan tidak berdaya menolong dirinya sendiri, maka beban penderitaan yang harus ditanggung semakin besar.

Lebih mengerucut, dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa. Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, maka dibutuhkan peranan badan pemberdayaan perempuan kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan pada keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku. Pemberdayaan perempuan seharusnya tidak dimaksudkan untuk memaksa perempuan bersaing dengan laki-laki dalam sektor publik untuk mencapai posisi yang sejajar, tetapi seharusnya dilakukan untuk mendorong perempuan (dan juga laki-laki) menciptakan kerja sama dan sinergi antara perempuan dan laki-laki baik dalam sektor domestik maupun publik dalam mencapai tatanan keluarga dan masyarakat yang aman dan nyaman.

Sulaiman Asang, (2012) Pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan Paradigma baru pembangunan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya motivasi, menggali potensi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memiliki

keterikatan dalam melaksanakan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peran badan pemberdayaan perempuan Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para pedagang yang ada di Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2011:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sumber data penelitian adalah data primer dan skunder. Data Primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis dokumen dalam penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pemberdayaan perempuan Kota Padangsidempuan dan di pasar Sagumpal Bonang dengan sasaran utama adalah para pedagang kaum perempuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka mengetahui peran Badan Pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pedagang pasar Sagumpal Bonang

Kota Padangsidimpuan, penulis menggunakan alat analisis dengan sub-sub konsep yaitu hak dan kewajiban dengan indikator kompetensi petugas lapangan serta pelaksanaan tupoksi yang menunjang terwujudnya visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Padangsidimpuan. Badan Pemberdayaan perempuan memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik. Tujuan dari pemberdayaan perempuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan yang mempunyai kemampuan dan keamanan guna kemandirian, dengan bakat kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terciptanya gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi (kemasyarakatan dan politik), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan. Dalam kegiatan pemberdayaan perempuan terdapat kebijakan pemberdayaan Perempuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan program-program pemberdayaan perempuan agar tercapai hasil yang diharapkan yaitu dapat memberdayakan perempuan Indonesia sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan memiliki antara lain:

1. Mengarusutamakan gender dalam pembangunan daerah pada semua sektor melalui kelembagaan/ wadah yang telah ada.
2. Memperluas kelembagaan penanganan pemberdayaan perempuan sebagai wadah jejaring (Network) untuk mendukung kemajuan dan kemandirian perempuan.
3. Meningkatkan komitmen antar lembaga pemerintah, swasta dan independen

untuk pemberdayaan perempuan baik dalam hal pengembangan kelembagaan, proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi.

Kesejahteraan bukan merupakan fenomena ekonomi semata, tetapi lebih merupakan fenomena sosio-budaya, di mana nilai-nilai interaksi sosial yang berlangsung lebih menentukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, konsep sejahtera dirumuskan lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Tentu saja, konsep sejahtera tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang atau pun keluarga sebagai identitas, tetapi juga kebutuhan psikologisnya.

Dalam pelaksanaan program-program Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Padangsidimpuan, terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya kesadaran para pedagang dalam hal pelatihan atau sosialisasi yang dilaksanakan. Hal ini karena para pedagang beranggapan bahwa yang paling penting dalam berdagang adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal jauh di samping itu, kualitas barang dan pemeliharaan barang agar tetap terjaga adalah hal yang paling penting. Masalah lain yang ditemukan pada pedagang adalah:

1. Asset modal berjualan yang memadai dan kurangnya kemampuan pedagang perempuan dalam upaya pengembangan kegiatan usaha yang tidak memenuhi.
2. Para pedagang lebih terpusat pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif pedagang miskin, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat miskin yang lebih substansial.
3. Pedagang dominan bersifat karitatif dan punitif.
4. Proses pelaksanaan program tidak berkesinambungan karena kurangnya pengawasan dari lembaga yang berperan untuk itu.

Dari hasil wawancara dari beberapa sumber yang ada di Kantor Badan

Pemberdayaan Perempuan Kota Padangsidimpuan di ketahui bahwa tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang dilakukan peneliti. Strategi yang dilakukan dalam menunjang terwujudnya visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Padangsidimpuan khususnya kepada para pedagang perempuan yaitu:

#### A. Bimbingan Konseling

Dari informasi yang disampaikan oleh informan bahwa ada beberapa perempuan yang selama ini mengalami banyak masalah baik dalam lingkungan keluarga dan kelompok atau hubungan emosionalnya dengan kelompoknya mereka sering menceritakan keluhannya dan meminta saran kepada seksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Hal ini menjadi salah satu fungsi bagian seksi perlindungan Perempuan untuk memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran baik dalam bentuk solusi atau saran untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah yang sering dihadapi yaitu anak yang kurang perhatian dari orangtua karena harus bekerja penuh di pasar. Waktu seorang ibu di rumah berkurang sehingga banyak pekerjaan rumah yang terkendala.

#### B. Pemberdayaan Kelompok

Terlihat bahwa terdapat ketidakmerataan keterlibatan perempuan di dalam proses yang berkaitan dengan keterlibatan mereka pada program-program kerja yang dilaksanakan. Hal itu kemudian menjadi penghambat bagi perempuan untuk berkembang sebagaimana yang yang dimaksudkan di atas ada ada keinginan terlibat akan tetapi sudah ada yang di tunjuk langsung dari kecamatan Sebagaimana keberhasilan suatu proses pemberdayaan perempuan apabila semua perempuan dapat terlibat dan berdaya.

#### C. Pemberdayaan Kelompok Usaha

Terlihat bahwa sebelumnya sudah ada usaha yang digagas tetapi kenadalanya adalah

pabrik yang menjadi sarana untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dan juga menjadi salah satu strategi untuk memberdayakan kaum perempuan di desa serang tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tujuan dari pemberdayaan adalah memberi kesempatan perempuan agar dapat terlibat pada proses pembangunan di pasar Sagumpal Bonang.

#### D. Memotivasi Perempuan

Dari informasi yang disampaikan oleh informan, sudah ada itikad yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan untuk memotivasi perempuan namun hanya sebagian yang mau mendengar ada juga yang kurang merespon. Upaya yang kemudian dilakukan kedepannya adalah lebih sering melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan kapasitas diri mereka untuk meningkatkan minat mereka dalam pengembangan keahlian yang dimiliki.

#### E. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Pelatihan yang dilakukan selama ini belum merata dan kurang tersistematis dari proses pelatihan yang melibatkan masyarakat secara umum sehingga pedagang perempuan kurang terhadap pengembangan diri, sementara itu yang harus dilakukan manajemen puncak terhadap pelatihan kesadaran dan keterampilan harus disesuaikan dengan kondisi dan lokasi yang digunakan sebagai penetapan program kerja.

#### F. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Sebelumnya bahwa masih ada beberapa pedagang perempuan di pasar Sagumpal Bonang belum sepenuhnya berkembang karena kemampuan kaum pedagang belum memadai dalam menggunakan teknologi.

Sesuai dengan tujuan program pemberdayaan, maka program jangka pendek dan panjang dibedakan dari lamanya suatu program dapat memberikan dampak terhadap pedagang perempuan. Jangka pendek adalah waktu yang diperlukan oleh suatu program aksi untuk dapat menghilangkan gejala

kelemahan mereka. Program jangka pendek ini berlangsung selama program jangka panjang (misalnya, pembangunan los dan kios yang baru, membangun pasar yang baru, penataan organisasi pedagang, penciptaan lapangan kerja tambahan bagi keluarga pedagang perempuan) belum mampu meningkatkan pendapatan pedagang perempuan, atau sampai ada program alternatif yang lebih baik. Dengan kondisi ekonomi dan keadaan pasar baru yang ada sekarang ini, maka jangka program jangka pendek diperkirakan adalah 2 sampai 3 tahun

Pelaksanaan strategi, kebijakan, dan program pemberdayaan pedagang perempuan memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, baik mulai dari tingkat provinsi, Kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang mempunyai otoritas politik dan bertanggung jawab atas terwujudnya strategi, kebijakan, dan program pemberdayaan. Otoritas tersebut mencakup wewenang dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan program serta pelaksanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi.

Bagi pedagang perempuan yang masih produktif perlu pembinaan yang intensif dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan berniaga sehingga bisa mandiri. Para pedagang perempuan penjaga toko diharapkan dapat memiliki kios atau los untuk berniaga secara mandiri bukan sebagai anak buah. Pengentasan pedagang perempuan, yaitu program pemberdayaan dengan melakukan penguatan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat bernafaskan gender, dan memperluas partisipasi pedagang perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa peran Badan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan para pedagang perempuan di

pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan anantara lain:

1. Memprioritaskan anggaran dan sumber daya, guna mencapai tujuan dan sasaran program pemberdayaan pedagang miskin.
2. Menetapkan prioritas dan target pencapaian program pemberdayaan kaum pedagang perempuan.
3. Mengevaluasi target pencapaian dan pelaksanaan program pemberdayaan.
4. Memfasilitasi kondisi pasar yang mendukung melalui penetapan peraturan daerah tentang pemberdayaan pedagang.
5. Memotivasi dan menguatkan organisasi partisipasi pedagang dalam pemberdayaan kaum pedagang perempuan untuk mencapai kemandirian.
6. Memberikan bantuan modal melalui simpan pinjam yang disediakan.
7. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pedagang.
8. Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap semua program pemberdayaan pedagang perempuan agar tetap berjalan dalam kebijakan-kebijakan yang telah disepakati.

Untuk mewujudkan program yang seutuhnya dan menyeluruh, Badan Pemberdayaan Perempuan diharapkan lebih konsisten dalam melaksanakan program-programnya. Salah satu yang harus ditingkatkan adalah terkait pelaksanaan evaluasi kembali terkait dengan program pemberdayaan sudah sampai pada tahap apa. Untuk para pedagang perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama

sebaiknya lebih banyak dilibatkan dalam memecahkan persoalan faktor-faktor penghambat dalam mengembangkan usaha bersama.

## REFERENSI

Asang, Sulaiman. 2012. *Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas*. Surabaya: Brilian Internasional.

Ginandjar Kartasasmitha. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.

Rizal Azwin Syahrul. 2013. *Pengertian Kesejahteraan Sosial*. (online),

([http://azwinsosialwelfare.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-kesejahteraan-sosial\\_8.html](http://azwinsosialwelfare.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-kesejahteraan-sosial_8.html)). 08 Desember 2021

Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.

Whandi. 2018. *Wanita di Era Globalisasi! Menuntut Emansipasi Namun Tidak Membuktikan Dirinya Layak Untuk Berkontribusi*. Opini (online). Universitas Tanjung Pura. <https://untan.ac.id/wanita-di-era-globalisasi-menuntut-emansipasi-namun-tidak-membuktikan-dirinya-layak-untuk-berkontribusi/#> Di akses tanggal 14 Desember 2021.